

**NOTULENSI
RAPAT KOORDINASI
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19**

- Hari/tanggal : Jumat, 17 April 2020
Pukul : 09.00 WIB – selesai
Pimpinan : Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas
Rapat
Peserta Rapat : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Sekretaris Daerah Prov Bali, Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara, Pj Sekretaris Daerah Papua
2. Kepala BNPB, pejabat di lingkup BNPB
3. ASOPS Panglima TNI
4. ASOPS Kepala Kepolisian RI
5. Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid 19
6. Direktur layanan Aplikasi Informatika pemerintahan (Direktur e Government) Kominfo
- Acara :
- Pembukaan oleh Kepala Gugus Tugas
- Paparan dari masing – masing Gubernur/Sekda/Kepala BPBD terkait upaya yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi
- Tanggapan dari Kepala BNPB selaku Kepala Gugus Tugas
- Penutup

Risalah Rapat :

1. Kepala Gugus Tugas menyampaikan pembukaan:
 - a. Perkembangan Covid-19 mengalami peningkatan. Data per 16 April 2020, jumlah kasus positif sebanyak 5516 oran, jumlah sembuh 548 orang, dan meninggal 496 orang.
 - b. Data provinsi dan pusat sudah mulai terintegrasi dengan baik, tetapi masih ada beberapa daerah yang datanya belum baik, masih ada perbedaan.
 - c. Laboratorium yang sudah terdata di Kementerian Kesehatan ada 78 lab, tetapi tidak semua lab dapat bekerja dengan baik. Gugus Tugas daerah bisa memastikan lab mana saja yg bisa beroperasi dengan baik. Rencana dalam minggu ini akan dikirimkan PCR.
 - d. Gugus Tugas sudah mendistribusikan APD ke kabupaten/kota, tetapi masih ada beberapa kendala, seperti masih adanya RS yg belum tercukupi kebutuhan APDnya.
 - e. Gugus Tugas daerah harus mewajibkan seluruh dokter dan tenaga medis, baik yang menangani pasien Covid-19 maupun tidak untuk selalu menggunakan APD berstandar WHO.
 - f. Gugus Tugas sudah membentuk relawan di kabupaten/kota. Seluruh relawan agar dapat dioptimalisasikan pekerjaannya.

- g. Terkait data-data kebijakan pemerintah daerah, seperti data tentang PSBB, dll mohon diinformasikan ke gugus tugas pusat.
 - h. Data yang masih diperlukan dari daerah yaitu data pasien yang sudah sembuh dan jumlah ruangan untuk isolasi. Data pasien yang sembuh dapat dimanfaatkan untuk melakukan kampanye ke masyarakat.
 - i. Di beberapa provinsi/kabupaten/kota pemutusan mata rantai pandemi Covid-19 sudah cukup berjalan dengan baik. Gugus tugas daerah diharapkan juga bisa memisahkan antara kelompok rentan (manula dan masyarakat yang memiliki penyakit bawaan) dengan kelompok yang sehat.
2. Gubernur Jawa Tengah menyampaikan hal – hal sebagai berikut:
- a. Pemprov Jawa Tengah menjadikan desa-desa sebagai agen terdepan. Desa-desa tersebut sudah membuat himbauan terkait Covid-19, menyediakan rumah-rumah untuk isolasi. Total sudah ada 350-an desa yang membuat tempat isolasi/karantina di wilayahnya masing-masing.
 - b. Terkait outbreak yang terjadi di RS Karyadi, pemerintah meminta agar RS tersebut mengubah SOP yang ada, karena pasti ada kesalahan dalam SOP tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya outbreak. Dari hasil penelusuran, banyak pasien yang tidak jujur ketika dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Pemerintah sudah menyiapkan hotel milik pemprov untuk isolasi pasien-pasien tsb.
 - c. Masyarakat Jawa Tengah yang tinggal di Jabodetabek dihimbau agar tidak pulang/mudik, Pemprov Jateng akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat, DKI Jakarta terkait penyiapan dana bantuan untuk membantu warga Jateng yang tinggal di wilayah Jabodetabek agar tidak memaksa pulang.
 - d. Terdapat perbedaan data antara Provinsi dengan Pemerintah Pusat terkait jumlah kasus positif Covid-19. Mungkin Pemerintah Pusat mengambil data kasus positif dari Litbangkes, tetapi data tersebut tidak/belum ditembuskan ke daerah sehingga datanya masih berbeda jauh. Pemerintah agar membuka semua data, tidak ada yang perlu ditakuti agar semua masyarakat aware dan masing-masing Pemerintah Daerah dapat menyiapkan tindakan di wilayahnya, misalnya apakah perlu dilakukan PSBB atau tidak.
3. Tanggapan Kepala Gugus Tugas:
- a. Untuk RS Karyadi, jika mengalami kekurangan APD agar didata dan dilaporkan lagi oleh Gugus Tugas Provinsi. Semua tenaga kesehatan agar menggunakan APD sesuai dengan standar WHO.
 - b. Data dari daerah harus satu pintu, dari provinsi ke gugus tugas dan juga Kemnekes. Saat ini karena terbatas PCR atau reagen maka keputusan seseorang ditentukan positif atau negatif memang terlihat sedikit dan Kemenkes masih keberatan jika data positif hanya ditentukan dari hasil rapid test.
4. Gubernur DKI Jakarta menyampaikan hal – hal sebagai berikut :
- a. DKI Jakarta memerlukan tambahan relawan tenaga kesehatan seperti dokter, surveilence dan laboran karena saat ini hanya terdapat sejumlah 65 relawan. Kebutuhan jumlah relawan jauh lebih besar kurang lebih sebanyak 2978 tenaga relawan sesuai dengan proyeksi Pemerintah DKI untuk 2 bulan ke depan.

- b. Kampung-kampung di Jakarta telah membentuk RTRW aman untuk mengamankan wilayah yang masih hijau dan tidak terpapar, RT/RW aman ini menjadi ujung tombak pemantauan ODP. Setiap Kota di Provinsi DKI terdapat 5 kampung model yang menjadi rujukan dan akan terus dikembangkan, dan sampai saat ini ada 30 model RT/RW aman telah dibentuk.
 - c. Pemerintah DKI Jakarta sudah mendata orang – orang yang membutuhkan Bansos. Sebelum masa Covid Pemprov DKI Jakarta telah memiliki data keluarga miskin dan setelah covid data tersebut ditambah lagi dengan warga masyarakat rentan miskin. Pemprov DKI Jakarta terus mendata pengumpulan baru untuk update berdasar kondisi saat ini di mana terdapat tiga kelompok penerima bansos antara lain kelompok miskin, rentan miskin, dan warga miskin yang tidak berKTP DKI Jakarta.
 - d. Pemprov DKI terus berkomunikasi dengan Jawa Tengah terkait warga Jawa Tengah yang tinggal di DKI Jakarta dan mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemic ini.
 - e. Data pasien Covid yang dimiliki Pemprov DKI sudah sinkron dengan pusat
5. Tanggapan Kepala Gugus Tugas :
- a. Kepala Gugus Tugas dan Ketua Tim Relawan sudah bertemu, sejumlah relawan yang telah mendaftar diprioritaskan untuk ditempatkan di DKI sehubungan dengan tingginya tingkat kelelahan yang dialami tenaga dokter dan perawat DKI Jakarta, Gugus Tugas akan mengupayakan nakes dari daerah dengan kasus covid sedikit untuk ditawarkan bergabung di Jakarta.
 - b. Apresiasi beberapa daerah di Jakarta sudah melakukan isolasi kampung. Perhatian juga terhadap kelompok penebar maut (kaum berusia muda dengan mobilitas tinggi) agar tidak boleh berdekatan dengan kelompok rentan lansia dan berpenyakit bawaan. Kepala Gugus Tugas juga mengusulkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan kamar-kamar di hotel di Jakarta untuk melindungi kelompok rentan/lansia.
 - c. Data penerima bansos harus *by name by address* untuk menghindari terjadinya duplikasi pemberian bantuan
 - d. Warga Jawa Tengah yang ada di DKI Jakarta dianjurkan tidak pulang dan dapat dibackup dari Provinsi Jawa Tengah.
 - e. Jenazah agar dimakamkan sesuai protokol pemakaman Covid-19, walaupun belum ada statusnya.
6. Gubernur Jawa Barat menyampaikan hal – hal sebagai berikut :
- a. Pemprov Jawa Barat telah melakukan beberapa tindakan strategis antara lain industri sudah digerakkan untuk memproduksi masker, saat ini kapasitas produksi masker sebanyak 250.000/hari dan akan ditingkatkan sampai akhir bulan diperkirakan akan dapat memproduksi 1 juta masker/hari. Dengan peningkatan jumlah ini kebutuhan di Indonesia akan dapat dicukupi. Produksi APD juga dikembangkan dengan standar WHO, industri yang membuat APD harus mendapat ijin dari Gugus Tugas.
 - b. Pemprov Jawa Barat sudah melakukan 70.000 Rapid tes dengan hasil positif sebanyak 1200. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak tes

dilakukan maka positif yang ditemukan juga akan semakin banyak. Tes PCR juga sudah mengalami peningkatan dari sebelumnya 140 sampel/hari menjadi 2000 sampel/hari.

- c. Pemprov Jawa Barat berencana untuk melakukan rapid tes kepada 0,6% jumlah penduduk sehingga diperlukan kurang lebih 200.000 rapid tes. Gubernur meminta informasi darimana bisa mendapat alat rapid test sejumlah tersebut.
 - d. Saat ini ITB sudah dapat memproduksi ventilator dengan harga yang lebih murah dari pabrikan seharga 12 juta/ventilator, namun terkendala belum keluarnya izin dari Pemerintah. ITB minta agar izin percepatan dan prosedur pengadaan ventilator disegerakan.
 - e. Pemprov Jawa Barat sudah memiliki kurang lebih 5000 orang relawan ditambah karang taruna yang sudah aktif menjadi relawan, jika DKI Jakarta membutuhkan bantuan agar berkoordinasi terkait spesifikasi relawan yang dibutuhkan.
 - f. Gubernur Jawa Barat sudah melakukan rapat dengan Kemensos dan dari hasil rapat tersebut disampaikan bahwa Presiden memberikan jatah untuk perantau di Bodebek sebesar Rp. 450.000 /KK, dan jika kurang Pemda Jawa Barat juga mengalokasikan sebanyak Rp. 500.000 /KK perantau untuk yang di luar wilayah Bodebek.
 - g. Terdapat berita buruk dari outbreak kasus Asrama Kepolisian Setukpa Sukabumi, yaitu perwira polisi yang dipulangkan ke Sulawesi Tenggara setelah dicek ternyata positif COVID hal ini perlu menjadi perhatian bagi ASOP Polri agar mengecek anggotanya yang telah dikembalikan ke daerah masing – masing.
7. Ketua Gugus Tugas memberikan tanggapan sebagai berikut :
- a. Apresiasi untuk industri di Jawa Barat yang telah mampu memproduksi APD sesuai standar WHO. Terkait untuk masker dengan spesifikasi N95, Gugus Tugas mendorong dan membantu pembiayaan bagi Balai Besar Tekstil Bandung untuk meningkatkan kapasitas pengecekan masker N95 karena masker ini membutuhkan pengecekan spesifikasi khusus.
 - b. UMKM tetap dioptimalkan untuk produksi APD tetapi tidak dibenarkan bagi tenaga medis untuk menggunakan APD yang diproduksi bukan dengan standar WHO, Kepala Gugus Tugas Wilayah harus memastikan bahwa tidak ada nakes yang melakukan praktek tanpa APD.
 - c. Untuk penyediaan Rapid test dan reagen mudah-mudahan minggu depan dapat mendapat reagen dari Cina
 - d. Untuk ventilator baik dari ITB, UNPAD, UNDIP dikoordinasikan oleh BPPT, dan dari BPPT akan diarahkan ke Biofarma untuk selanjutnya BNPB akan membeli melalui Biofarma.
 - e. Relawan Jabar jumlahnya sangat banyak agar terus berintegrasi dan Gubernur Jawa Barat dapat membuat SK terkait penunjukan koordinator relawan.
8. Gubernur Jawa Timur menyampaikan hal sebagai berikut :
- a. Gubernur telah meluncurkan RAISA (Robot Medical Assistant) dan robot ini telah digunakan untuk membantu nakes, di RS dr Sutomo dan Unair dan akan dikembangkan di RS lain yang menjadi rujukan Covid-19 di Jawa Timur.

- b. Pemprov Jatim telah melakukan kontrak tenaga medis dengan 470 orang nakes dengan distribusi sebanyak 110 untuk RSPI Unair dan sisanya untuk RS lain yang menjadi RS rujukan Pemprov, selain itu terdapat relawan tenaga medis FKM sebanyak 1.800 orang.
 - c. Sebanyak 74,6 % desa di Jatim sudah memiliki ruang observasi.
 - d. Terkait dengan sholat jenazah karena hukumnya adalah fardu kifayah dan banyak keluarga korban yang meragukan, Gubernur memastikan bahwa jenazah setelah dilakukan treatment sesuai WHO akan disholatkan agar membuat keluarga jenazah merasa tenang.
 - e. Sampai saat ini terdapat 246 orang positif di Surabaya, walaupun belum ada persiapan untuk PSBB, Pemerintah telah melakukan Patroli Berskala Besar yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Kapolda Jatim telah melakukan patroli mengarah pada zona merah dengan menggunakan pakaian APD, penyemprotan juga telah dilaksanakan di 622 perumahan dan 263 ruas jalan zona merah dilakukan buka tutup di jam padat.
9. Ketua Gugus Tugas memberikan tanggapan sebagai berikut :
- a. Apresiasi upaya yang telah dilakukan Pemprov Jatim dengan menggunakan teknologi dan jumlah Robot agar bisa diperbanyak, kontrak tenaga medis dilanjutkan dan bila ada kelebihan agar diinfokan ke Pusat untuk dapat diperbantukan ke wilayah lain yg kekurangan.
 - b. Desa isolasi mandiri sangat baik untuk memutus mata rantai Covid-19, kepada Gubernur Jatim agar memaksimalkan peran pendekatan ulama untuk memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat.
10. Gubernur Gubernur Banten menyampaikan hal sebagai berikut :
- a. Pemprov Banten menyiapkan RSUD Banten menjadi rumah sakit khusus penanganan Covid-19.
 - b. Pemprov Banten telah melakukan upaya antara lain bekerjasama dengan perusahaan yg memproduksi APD dan bahkan membuat masker N 95. Pemprov juga telah mendata relawan yang bergabung.
 - c. Persoalan sosial banyak dihadapi, Jabodetabek rencana akan diberikan paket sembako, sementara Banten baru melaksanakan PSBB mulai besok, Pemprov berencana memberikan bantuan sebesar Rp.500.000/KK untuk warga terdampak.
 - d. Dari hasil survey sebanyak 62% warga Jateng dan Jatim kerja di Tangerang Raya dan sebagian besar sudah tidak bekerja dan menyatakan bahwa lebih senang pulang kampung,
 - e. Pemprov Banten memperbolehkan industri tetap berjalan sepanjang tetap melakukan protokol kesehatan dan apabila di kawasan industri atau pabrik ada yang terpapar covid maka pabrik dapat ditutup sementara.
 - f. Pemprov Banten sudah menyiapkan 1 hektar lahan untuk pemakaman pasien Covid-19.
 - g. Minta kepastian dukungan bansos karena masyarakat sudah melakukan gugatan.
 - h. Kereta api (KRL) akan menjadi masalah pada saat pemberlakuan PSBB. Jika tidak dilakukan upaya pembatasan transportasi KRL maka PSBB menjadi tidak

efektif. Pemprov Banten minta kerjasama dengan Pemprov DKI untuk merumahkan pekerja selama 14 hari pada saat PSBB.

11. Ketua Gugus Tugas memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - a. Untuk APD masker N 95 sesuai standar WHO pengadaan tidak mudah karena ada standar tertentu dalam penyaringan partikel yang harus dipenuhi.
 - b. Data relawan dapat dilaporkan ke gugus tugas, diharapkan Gubernur menetapkan SK penunjukan koordinator relawan.
 - c. Warga yang menuntut pulang untuk dipertahankan agar tidak pulang, jika memaksa pulang maka harus dikoordinasikan antara kepala daerah untuk protool penerimaan.
 - d. Masyarakat yang mulai melakukan gugatan agar dilakukan komunikasi dan pendekatan.
 - e. Terkait dengan penghentian KRL, gugus tugas merencanakan pada minggu sore akan dirapatkan dengan pejabat daerah dan pejabat perhubungan terkait.

12. Gubernur DIY melalui Kepala BPBD DIY menyampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Aktifitas masyarakat saat ini sudah mulai meningkat, pemerintah akan melakukan upaya penegakan hukum melalui Polri dan TNI
 - b. Pemprov DIY mewaspadaai potensi peningkatan pemudik dengan melakukan konsolidasi dari tingkat desa. Warga DIY telah membentuk Desa Kampung Tangguh Covid (Deskatavid) yang akan menjadi acuan masyarakat desa untuk dapat merespon pemudik dengan baik.

13. Kepala Gugus Tugas memberikan tanggapan agar Deskavid diteruskan.

14. Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Provinsi Sulsel telah melakukan sejumlah upaya percepatan. Saat ini jumlah pasien yang sembuh atau bebas dari pemantauan terus meningkat, jumlah ODP dari 2700 orang, sebanyak 2100 sudah selesai pemantauan. Pemprov telah menetapkan scenario bagi ODP yang masih tersisa sebanyak 612 orang sebelum pelaksanaan PSBB akan diikuti pesantren kilat di hotel – hotel dengan tetap menjalankan kegiatan sesuai protokol kesehatan.
 - b. PSBB di Makassar akan diawali dengan sosialisasi selama 4 hari dan dilakukan isolasi wilayah mulai dari tingkat RT/RW. Pemerintah menjamin kebutuhan logistik masyarakat terpenuhi agar tidak membuat masyarakat panik.
 - c. Pemprov Sulsel telah menyiapkan 500 kamar untuk pasien covid-19, kebutuhan RS dan ventilator di Sulsel masih dapat dipenuhi. Tenaga kesehatan dokter perawat tidak dipulangkan dan diinapkan di hotel.
 - d. Pemprov telah menyediakan pemakaman khusus Covid 19.
 - e. Masyarakat, ormas, pengusaha Makassar bahu-membahu mengatasi covid dengan berbagai sumbangan yang diberikan.
 - f. Pemprov memberikan support sembako kepada 11.000 KK dan menyampaikn bahwa sangat terbantu dengan adanya program Pra Kerja dari Pemerintah Pusat
 - g. TNI dan Polri menyiapkan dapur umum dengan support bahan makanan dari Provinsi dan Kabupaten/kota.

h. Pemprov telah mengadakan Program peduli manula

15. Ketua Gugus Tugas memberikan tanggapan :

- a. 90% pasien positif yang meninggal adalah lansia dan sisanya adalah pasien dengan penyakit penyerta jantung, diabet, kanker, dan asma.
- b. Memberikan apresiasi terhadap Program peduli manula dan agar wilayah lain dapat mencontoh.
- c. Kepala gugus tugas di kab/kota/provinsi agar memanfaatkan unsur TNI, Polri dan Kejaksaan dan harus terus berkolaborasi dan bergerak simultan.

16. Pj Sekda Papua menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Status Provinsi Papua sejak 10 April 2020 telah ditetapkan menjadi tanggap darurat
- b. Pemprov saat ini fokus melakukan upaya pencegahan karena Papua mempunyai banyak hambatan antara lain faktor geografis dan kurangnya fasilitas kesehatan serta adanya penyakit endemis seperti Malaria, TB, AIDS, dll
- c. Masalah yang dihadapi Pemprov antaranya jumlah laboratorium yang diberi wewenang untuk tes PCR hanya 1 di Kota Jayapura, pemerintah mengalami kesulitan dalam mengantar dari kabupaten yang merujuk sampel (Mimika, Nabire, Merauke). Pemerintah Pusat diharapkan dapat membantu dengan menambah lab di daerah tersebut.
- d. APD yang diterima dari Gugus Tugas sebanyak 2000 dan sudah didistribusikan ke kab/kota. Papua tidak mempunyai kemampuan untuk memproduksi APD
- e. Rapid tes yang dimiliki sebanyak 20.000 dan sudah terpakai sebanyak 2000 dan sisanya sebanyak 4000 sudah disitribusikan ke kab/kota.
- f. Jumlah Ventilator yang dimiliki Papua terbatas.
- g. Bansos dan jaring pengaman sosial sudah disiapkan.
- h. Nakes sudah disiapkan hotel untuk menginap.

17. Kepala Gugus Tugas memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Papua berbeda dengan provinsi lain karena keterbatasan yang dimiliki, Pemerintah Pusat sangat menghargai langkah pemerintah Prov Papua dan akan terus memperhatikan Papua,
- b. Meminta agar yg ODP dan PDP benar-benar disiplin dalam melakukan isolasi. TNI Polri dilibatkan dan pemda menyiapkan tempat isolasi untuk masyarakat yang pernah kontak dengan orang positif COVID.
- c. Terkait dengan Laboratorium, BUMN telah mengirim 1 set lab ke Jayapura dan meminta agar dimonitor ke BUMN.
- d. APD yg sudah didistribusikan ke Papua sesuai dengan catatan sebanyak 18.500 agar dicek dokumen penyerahan. Distribusi di daerah harus sesuai dengan yang diberikan pusat. Sesuai data, APD yang didistribusikan ke Papua seharusnya sudah cukup.

18. Sekda Provinsi Bali menyampaikan hal sebagai berikut :

- a. Kasus positif di Bali bergerak naik terus, sampai 16 April 2020 sebanyak 113 orang dinyatakan positif, jumlah tersebut dibagi menjadi 2 komponen transmisi lokal sebanyak 16 % dan sisanya *imported case* berasal dari PMI (pekerja migran Indonesia). Sumber terbesar positif adalah pekerja migran dan kepada mereka dilakukan skrining ketat di bandara dengan rapid tes, sehingga hasil dapat diketahui secara cepat .
- b. Sesuai dengan kesepakatan, untuk kasus positif menjadi tanggung jawab Provinsi dengan prosedur Pemprov membawa ke tempat karantina khusus dilanjutkan dilakukan tes swab, jika positif akan tetapi tidak ada gejala atau sehat maka akan dilakukan karantina di tempat karantina, namun jika dinyatakan positif dan menunjukkan gejala maka akan diisolasi di Rumah Sakit yang menjadi rujukan antara lain RS Udayana, RS Sanglah dan RS Bandara. PMI dengan hasil tes negatif akan dikarantina selama 1 hari di provinsi selanjutnya akan dijemput oleh kab/kota untuk dilanjutkan karantina di wilayahnya.
- c. Terkait dengan banyaknya PMI tersebut Sekda meminta agar Ketua Gugus Tugas dapat menambah alokasi jumlah rapid tes untuk Bali.
- d. Bali telah mempunyai 16 RS rujukan, menyiapkan hotel untuk istirahat tenaga kesehatan, dan telah mendistribusikan APD secara langsung begitu APD tersebut sampai di bandara.
- e. Untuk upaya pencegahan transmisi lokal, Pemprov terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker, melakukan PHBS dan physical distancing.
- f. Industri garmen di Bali mampu membuat masker kain untuk digunakan masyarakat.
- g. Protokol kepulangan ABK dengan kapal pesiar dilakukan rapid tes diatas kapal, ABK turun sesuai kelompok kemudian dipisahkan ABK asal Bali dan Non Bali. Untuk ABK Bali langsung dijemput Kab/Kota untuk dikarantina di tempat karantina masing-masing, untuk ABK non Bali diantar ke Hotel Patra Jasa untuk mengikuti karantina dan diatur pemulangan ke daerah masing-masing diatur oleh BP3TKI dan agen masing-masing.

19. Ketua Gugus Tugas memberikan tanggapan dan apresiasi kepada Pemprov Bali yang sudah sangat bagus kerjasamanya, dan bila ada kekurangan dan kendala agar dapat melaporkan secara langsung ke Ketua Gugus Tugas,

20. Kalak BPBD Sumatera Utara menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Saat ini jumlah terpapar Covid-19 di Sumatera Utara mencapai 103 orang positif yang didapatkan dari hasil PCR 79 orang dan rapid tes 34 orang serta merawat 139 orang PDP di berbagai RS.
- b. Pemprov telah mempersiapkan 26 RS tersebar di Kab/Kota dengan 8 RS rujukan utama dan RS rujukan di 6 kab/kota serta RS cadangan dengan kapasitas 1500 pasien.
- c. Pemprov telah melatih dokter dan relawan untuk penanganan covid-19 dengan Bimtek paramedis,

- d. Sosialisasi dilakukan dengan menayangkan video testimoni dari pasien yang sembuh.
- e. Dokter dan paramedis di RS rujukan telah diinapkan di hotel.
- f. Terkait dengan pemakaman jenazah positif maupun terduga, Pemprov telah menyiapkan pemakaman khusus dan tidak ada penolakan.
- g. Relawan kemanusiaan dari PMI dan Pramuka banyak membantu untuk sosialisasi kepada masyarakat
- h. TNI dan POLRI mendukung penuh penanganan Covid terutama dalam penanganan PMI (Pekerja Migran Indonesia), PMI yang hasil tesnya dinyatakan positif langsung dilakukan perawatan. Jalur masuk PMI dilakukan sesuai dengan protokoler kesehatan dan protokol ketenagakerjaan
- i. Kalak memberikan usulan kepada Gugus Tugas antara lain :
 - penambahan PCR dan reagen sebanyak 20.000 untuk Sumatera Utara
 - Percepatan dukungan 9 RS BUMN menjadi RS rujukan CoVID, termasuk RS milik BUMN agar dapat melakukan tes PCR dan RS USU diperkenankan menjadi lab pemeriksaan sampel.
 - pengadaan APD lengkap sebanyak 5 item.
- j. Tekait dukungan dampak sosial ekonomi, Pemprov telah mendata masyarakat yang membutuhkan bansos, dan sebanyak 675 KK sudah menerima bantuan, sisanya masih terdapat 713.000 KK dan diharapkan dari jumlah ini sebanyak 600 orang dapat dibantu Kemensos dan 113.000 sisanya dapat dibantu Pemprov melalui APBD.

21. Kepala Gugus Tugas Pusat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- b. Untuk saat ini stok reagen sedang kosong dan diharapkan minggu depan sudah reagen tersebut sudah datang dari China.
- c. Terkait dengan RS BUMN menjadi RS isolasi akan dikomunikasikan kepada Kementerian BUMN
- d. Kepala BPBD agar berkoordinasi dengan Kadis Kesehatan untuk mempercepat penggunaan bantuan dari kementerian BUMN di RS Pelabuhan berupa laboratorium.
- e. Gugus Tugas telah mengirimkan 1000 PCR ke RS USU dan akan melengkapi APD Hazmat.

Notulis,

Tenny Monika

Mutiara Ayu Asmara